

# *Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Berbasis Pengelolaan Aset dan Sistem Akuntansi Keuangan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo*

Misnaini, Edi Subiyantoro, Maxion Sumtaky



Misnaini<sup>1</sup>, Edi Subiyantoro<sup>2</sup>, Maxion Sumtaky<sup>3</sup>; <sup>1,2,3</sup>Magister Akuntansi, Pasca Sarjana, Universitas Merdeka Malang, Jalan Terusan Dieng No. 62-64 Klojen, Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, 65146,, Jawa Timur.

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 2022-23-12

Received in revised form 2023-06-01

Accepted 2023-30-01

### Kata kunci:

Pengelolaan Aset, Sistem Akuntansi Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

### Keywords:

Asset Management, Financial Accounting Systems and the Quality of Regional Financial Reports.

### How to cite item:

Misnaini, Edi Subiyantoro, Maxion Sumtaky. (2023).

Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Berbasis Pengelolaan Aset dan Sistem Akuntansi Keuangan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

*Journal of Regional*

*Economics Indonesia*, 4(1).

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan aset dan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, yang hasilnya sangat dibutuhkan untuk menguatkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif yang menguji hipotesis pengaruh pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 orang responden pegawai kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa kemandirina fiskal daerah juga sangat ditentukan oleh kinerja tata kelola keuangan daerah berbasis pengelolaan aset dan sistem akuntansi keuangan.

This study aims to examine the effect of asset management and financial accounting systems on the quality of regional financial report, sthe results of which are needed to strengthen regional fiscal independence. This research is a descriptive quantitative approach that tests the hypothesis the effect of asset management on the quality of regional financial reports and the influence of the financial accounting systems on the quality of regional financial reports. The data used are primary data collected through direct questionnaire surveys. This study used a sample of 35 respondents who were employees of the Situbondo Regency Regional Finance and Asset Office. Data analysis using multiple linear regression analysis. The results of the study show that asset management has a positive effect on the quality of regional financial reports and the financial accounting system has a positive effect on the quality of regional financial reports. This finding reinforces the argument that regional fiscal independence is also largely determined by the performance of regional financial governance based on asset management and the financial accounting system.

\* Misnaini, Edi Subiyantoro, Maxion Sumtaky.

© 2023 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Penguatan tata kelola keuangan daerah sangat diperlukan sebagai strategi menuju kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tata kelola keuangan daerah adalah kualitas penyajian laporan keuangan daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, kualitas keuangan daerah harus disusun sejalan dengan penguatan pelaporan keuangan daerah. Hal ini seringkali diabaikan pada ragam diskusi penguatan desentralisasi fiskal yang rata-rata hanya menekankan pada strategi untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah berbasis penggalan potensi daerah.

Pelaporan yang akurat, relevan, tepat waktu dan andal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dan menciptakan otonomi daerah yang akurat (Pujho, 2022). Di Indonesia, laporan keuangan pemerintah daerah saat ini mulai membaik, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sebagian sudah memperoleh Pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Keberhasilan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mencapainya secara berkelanjutan.

Selain pelaporan keuangan, pengelolaan aset daerah memegang peranan penting dalam menjaga kinerja dan kualitas keuangan daerah. Peningkatan efisiensi pengelolaan aset akan membantu peningkatan pengelolaan dan keuangan daerah. Aset merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya aset merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun-akun lain dalam laporan keuangan. Keberadaan aset sangat mempengaruhi kelancaran pemerintahan dalam menjalankan roda pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dapat diandalkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah (Yuswanita, *et al.*, 2018).

Sebagai wujud pelaporan keuangan daerah yang berkualitas, dibangunlah suatu sistem akuntansi yang baik. Hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Namun demikian, kualitas laporan keuangan pemerintah tidak dapat diwujudkan hanya dengan sistem akuntansi yang baik dan benar, tetapi juga terdapat faktor-faktor pendukung, seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman aparatatur atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilimpahkan kepadanya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Untuk dapat menjawab pertanyaan tentang akuntabilitas, kepala daerah diberikan tanggung jawab untuk mengawasi sumber daya publik (Nurlaila, 2004).

Ketika faktor-faktor lain tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka terjadi kemungkinan tingginya jumlah laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang berkualitas, sehingga reformasi akuntansi pengelolaan keuangan daerah menjadi sulit dicapai. Padahal hal ini sangat diperlukan untuk mencapai derajat kualitas desentralisasi fiskal yang berkelanjutan, yang kemudian akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo adalah salah satu yang berkepentingan dalam menguatkan tata kelola keuangan daerah berbasis pada kinerja laporan keuangan dan pengelolaan aset daerah. Hal ini karena Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo menerima APBD yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga diperlukan laporan keuangan yang handal. Dalam penelitiannya, Hidayati *et al.*, (2016) menemukan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebagai akibat dari buruknya pengelolaan barang milik daerah, karena ketidakmampuan untuk mencapai tata kelola aset atau barang pemerintah daerah secara baik. Beberapa daerah juga

mengalami penurunan Opini dari Wajar Tanpa Pengecualian menjadi Wajar Dengan Pengecualian atau tidak Memberi Pendapat (Ferdianus, 2013). Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo mampu mempertahankan pencapaian opini WTP selama 6 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2016 sampai tahun anggaran 2021. Meski sudah relatif baik, namun masih dibutuhkan perhatian lebih besar lagi, salah satunya pengelolaan aset daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Prahaski (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah masih ditemukan kekurangan dalam aspek kepastian nilai aset daerah, dengan hasil pengujian yang diperoleh bahwa variabel pengelolaan aset daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun variabel sistem akuntansi keuangan daerah masih ditemukan kekurangan dalam aspek identifikasi prosedur dengan hasil pengujian variabel sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Slamet *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian Prahaski (2018), yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan perbedaan kedua temuan penelitian tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai pengelolaan aset daerah untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh pengelolaan aset dan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini penting sebagai bagian dalam menciptakan kualitas tata kelola keuangan daerah sebagai prasyarat menciptakan kemandirian fiskal daerah. Penelitian dilakukan karena terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan aset daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah, diantaranya: (i) keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan

tidak memenuhi standart dan kurangnya tim pengelola dalam bidang aset, dimana menjadi tim pengelola aset harus sudah menjadi ASN, tetapi bidang aset sendiri masih banyaknya pegawai non ASN; (ii) kesulitan dalam menerapkan Permendagri yang baru yaitu Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Terdapat tiga pertanyaan penting yang berusaha dijawab dalam penelitian, yaitu: (i) bagaimana deskripsi pengelolaan aset, sistem akuntansi keuangan dan kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Situbondo; (ii) apakah pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Situbondo; dan (iii) apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Situbondo. Tiga pertanyaan tersebut dapat memberikan kontribusi untuk membangun kerangka kemandirian fiskal dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah.

---

## **2. Pengelolaan Aset dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran serta belanja daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 menyebutkan bahwa aset milik daerah adalah seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tahap-tahap pengelolaan aset daerah menurut Permendagri Nomor 17 tahun 2007 diantaranya dimulai dari: (i) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (ii) pengadaan; (iii) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; (iv) penggunaan; (v) penatausahaan; (vi) pemanfaatan; (vii) pengamanan dan pemeliharaan; (viii) penilaian; (ix) penghapusan; (x) pemindahtanganan; (xi) pembinaan, pengendalian dan pengawasan; (xii) pembiayaan; dan (xiv) tuntutan ganti rugi.

Sistem akuntansi keuangan adalah suatu sistem proses identifikasi, pengukuran serta pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang disajikan sebagai informasi dalam

pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim, 2013). Sedangkan menurut Mokoginta *et al.*, (2017), sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standart dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern serta ekstern Pemerintah Daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tahapan penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 adalah: (i) identifikasi prosedur, dimulai memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah; (ii) menentukan pihak-pihak terkait, agar dapat menghasilkan output yang diinginkan; (iii) menentukan dokumen terkait sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen, serta mengidentifikasi dokumen yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal; dan (iv) menentukan jurnal standar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Yunita, 2019). Agar laporan keuangan memenuhi kualitas yang dikehendaki maka harus memenuhi empat karakteristik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

---

### 3. Metodologi

Penelitian ini bersifat deskriptif melalui pendekatan kuantitatif yang menguji hipotesis pengelolaan aset daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah. Tujuannya untuk menghubungkan bagaimana implikasinya terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Kuesioner ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (i) bagian informasi, peneliti bermaksud mengenali informasi umum,

jenis kelamin serta lamanya bertugas responden; dan (ii) bagian statement, responden dimohon untuk memilah item yang cocok dengan keadaannya dengan rasio linkert dari 1 sampai 5. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Akuntansi dan Aset Kabupaten Situbondo yang berjumlah 35 orang. Teknik pengumpulan data dengan cara pembagian lembar pernyataan yang harus diisi oleh responden.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini diolah dan dianalisis dengan alat statistik antara lain uji instrument, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Data dianalisis menggunakan uji regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

---

#### 4. Hasil Pembahasan

##### a. Hasil Uji Asumsi Klasik

###### 1) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa signifikansi nilai *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan tingkat kepercayaan 0,005 yaitu sebesar 0,200. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Sedangkan hasil pengujian dengan menggunakan histogram yaitu berbentuk kurva menggunung yang berarti data terdistribusi normal. Selanjutnya hasil pengujian dengan menggunakan P-Plot SPSS menunjukkan data berdistribusi normal yakni titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya.

###### 2) Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* sebesar 0,638 >10 dan nilai VIF 1.567 <10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

###### 3) Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (2-tailed) pengelolaan aset (0,862) dan sistem akuntansi keuangan (0,841) menunjukkan nilai di atas nilai standar signifikansi penelitian yaitu lebih besar dari > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

**b. Hasil Uji Hipotesis**

1) Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 01. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel Independen	Koefisien regresi	Probabilitas (Signifikansi)	t
X1. Pengelolaan Aset	0,393 (0,109)	0,001	3.560
X2. Sistem Akuntansi Keuangan	1.044 (0,108)	0,000	9.459

Variabel Dependen

Y. Kualitas Laporan Keuangan

R : 0,867

R<sup>2</sup> : 0,751

Signifikan F : 0,000

2) Uji ketepatan/keberartian model (Uji F)

Berdasarkan Tabel 01, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa kedua variabel independen yakni pengelolaan aset dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3) Uji Signifikansi Variabel (Uji t)

Hasil interpretasi atas hipotesis (H1 dan H2) adalah “pengelolaan aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (X1)”

- Berdasarkan Tabel 01, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel pengelolaan aset sebesar  $0,001 < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan aset berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan pengelolaan aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima.
- Berdasarkan Tabel 01, dapat dilihat bahwa nilai variabel sistem akuntansi keuangan sebesar  $0,00 < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan



keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan “sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” diterima.

4) Uji Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan Tabel 01, bahwa nilai koefisien Determinasi ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0,751 yang artinya bahwa pengaruh Pengelolaan Aset ( $X_1$ ) dan Sistem Akuntansi Keuangan ( $X_2$ ) terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) sebesar 75,1% dimana sisanya 24,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

**c. Analisis Regresi Berganda**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengelolaan aset dan sistem akuntansi keuangan serta variabel terikatnya adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Rincian dari hubungan variabel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien Regresi
- $X_1$  = Pengelolaan Aset
- $X_2$  = Sistem Akuntansi Keuangan
- E = Standart Error

**d. Uji Hipotesis**

Peneliti menggunakan Uji F simultan yang bertujuan untuk mengukur pengaruh bersama-sama variabel independen (pengelolaan aset dan sistem akuntansi) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah). Hal tersebut dilihat dari bagan anova dengan ketentuan sebagai berikut:

- o Jika nilai  $F < 0,05$  maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti pengelolaan aset dan sistem akuntansi keuangan bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- Jika nilai  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hasil tersebut menunjukkan tidak adanya pengelolaan aset dan sistem akuntansi keuangan bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Rumus pada uji pengaruh simultan (Uji F) adalah sebagai berikut:

$$\text{Uji F} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

$R^2$  = koefisien regresi

$k$  = jumlah variabel

$n$  = jumlah sampel

**e. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)**

Dalam rangka menguji hipotesis berpengaruh secara parsial atau tidak, dilakukan proses hitung seperti di bawah ini:

Rumus uji (t) pengaruh parsial:

$$t = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Keterangan :

$H_a : \beta_n$

$H_o : S\beta_n$

Berdasarkan nilai signifikansi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05, maka dugaan tidak mempengaruhi ditolak dan dugaan yang mempengaruhi diterima. Hal ini bahwa terdapat pengaruh parsial variabel pengelolaan aset dan sistem akuntansi keuangan terhadap variabel dependen dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Jika nilai signifikansi lebih kecil probabilitas 0,05, maka dugaan tidak mempengaruhi diterima dan dugaan mempengaruhi ditolak yaitu tidak ada pengaruh parsial variabel dari pengelolaan aset dan sistem akuntansi keuangan terhadap variabel dependen dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Afdal, 2018; Alice, et al., 2021).

Dari hasil pengolahan statistik, maka dapat diuraikan dua aspek pembahasan, yaitu: (i) pengaruh pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; dan (ii) pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Keduanya akan dilihat dampaknya terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah sebagai salah satu bagian penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan. Pembahasan dari keduanya dapat dirinci sebagai berikut:

**a. Pengaruh Pengelolaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis, bahwa pengelolaan aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga secara langsung akan berdampak pada penguatan tata kelola keuangan daerah. Semakin tinggi kualitas pengelolaan aset daerah, maka secara bertahap akan berdampak pada proses penguatan kemandirian fiskal daerah.

Pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo meliputi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD). Pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dimulai dari tahap perencanaan diantaranya dengan memperhatikan ketersediaan Barang Milik Daerah (BMD) yang sudah ada sebelumnya, lalu pemerintah daerah mengusulkan anggaran pengadaannya.

Perencanaan sebagai tahapan awal dan penting dalam pengelolaan BMD merupakan komponen yang sangat diperlukan untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik (Yusuf, 2015). Apabila suatu perencanaan pengelolaan BMD dilaksanakan dengan baik, efisien, dan efektif, maka dapat menghemat terhadap pengeluaran anggaran belanja pemerintah daerah dan juga terhadap BMD. Hal ini merupakan proses yang perlu dilakukan untuk menguatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, pengelolaan aset yang baik akan berdampak terhadap laporan keuangan daerah, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan daerah sebelumnya untuk kebijakan akuntansi yang sama.

Selanjutnya, panitia pengadaan barang dan jasa Kabupaten Situbondo menggunakan RKA-OPD sebagai dasar dalam melakukan pengadaan barang/jasa. Pada tahap ini wajib dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, bersaing, adil dan *accountabel*. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo telah melakukan pengadaan barang milik daerah dengan optimal, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah lengkap dan telah mencakup informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Selanjutnya pengguna/kuasa pengguna barang telah membuat kartu inventaris barang serta melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam daftar barang pengguna. Hal ini mencerminkan bahwa tahap penatausahaan BMD Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan berlaku, sehingga dengan terlaksananya penatausahaan yang baik, maka dapat memberikan informasi kepada para *stakeholders* yang memerlukan.

Selain itu, guna menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan aksi (tupoksi) OPD Kabupaten Situbondo, pengguna barang melakukan pemanfaatan BMD berupa tanah dan/bangunan setelah mendapat persetujuan dari pengelola tetapi tidak mengubah status kepemilikan BMD daerah.

Pengguna/kuasa pengguna telah menyusun laporan barang semesteran/tahunan dan disampaikan kepada kepala daerah melalui pengelola, sehingga dapat memudahkan para *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan tersebut. Dengan pengelolaan aset yang efektif, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga mampu memperlancar kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Kusmariyanto (2022), yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Situbondo mengenai pengelolaan aset telah mengelola aset dengan optimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan

keuangan daerah. Laporan keuangan daerah yang berkualitas merupakan prasyarat dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang kredibel, sehingga menjadi bagian penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

#### **b. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis, bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, dimana pencatatan dengan menggunakan SAP berbasis akrual pencatatannya segera dilakukan setelah terjadinya transaksi dan laporan keuangan yang disajikan akan jelas dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Dengan menggunakan SAP berbasis akrual, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya untuk kebijakan akuntansi yang sama dan akan mampu meningkatkan dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah akan direview oleh Inspektorat Kabupaten sebelum disampaikan kepada BPK. Review ini berguna agar laporan keuangan dapat menghasilkan LKPD yang berkualitas, jujur dan wajar.

Laporan keuangan dalam standar akuntansi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terdiri dari laporan keuangan OPD dan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan OPD diantaranya adalah Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD. Sedangkan laporan keuangan konsolidasi diantaranya adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dalam standar akuntansi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo telah mencakup seluruh realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Dengan adanya

unsur-unsur ini, maka pemerintah daerah telah menyusun laporan keuangan dengan benar, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas LKPD.

Untuk nilai aset yang disajikan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berkembang, maka informasi yang disajikan memuat informasi yang lengkap dan telah mencakup seluruh informasi akuntansi dan pencantuman nilai aset didasarkan pada harga perolehan. Hal ini didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, sehingga memudahkan *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan tersebut.

Terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas tergantung pada sistem akuntansi keuangan daerah yang optimal. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian penting dari pemerintah daerah setempat. Sumber daya manusia yang mengelola laporan keuangan perlu ditingkatkan kualitasnya melalui beragam pelatihan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Slamet (2022), Yunita (2019), dan Mokoginta (2017), yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem akuntansi keuangan telah sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan muaranya bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah. Hasil penelitian ini menguatkan argumentasi bahwa kualitas desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaporan keuangan daerah.

---

## 5. Penutup

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan aset, sistem akuntansi keuangan dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo diantaranya sebagai berikut:
  - 1) Pengelolaan aset telah dikelola secara baik dilihat dari dimensi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penatausahaan, dan pemanfaatan BMD. Semakin baik pengelolaan aset daerah, maka kualitas laporan keuangannya juga baik, karena di dalam laporan keuangan nilai aset adalah nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun-akun lain, sehingga berpengaruh terhadap LKPD.

- 2) Sistem akuntansi keuangan telah dilakukan dengan baik dilihat dari dimensi identifikasi prosedur, pihak-pihak terkait, dan dokumen terkait. Dengan demikian terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas tergantung pada sistem akuntansi keuangan daerah yang optimal.
  - 3) OPD telah menyusun laporan keuangan dengan memadai, dilihat dari dimensi laporan keuangan yang dapat dibandingkan, relevan, andal, dan dapat dipahami. Dengan demikian laporan keuangan yang berkualitas akan mampu memberikan informasi kepada para *stakeholders* untuk pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Pengelolaan aset daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kabupaten Situbondo. Artinya, apabila pengelolaan aset daerah dikelola dengan baik maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan suatu daerah.

Sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kabupaten Situbondo. Artinya, sistem akuntansi keuangan yang optimal akan menentukan berkualitas tidaknya suatu laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil tersebut, maka saran yang bisa diusulkan adalah:

- a. Bagi penelitian selanjutnya
  - 1) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan teknik pengamatan, tidak hanya menggunakan kuesioner saja namun menambahkan teknik seperti wawancara dan observasi. Cara ini untuk mendalami secara detail pengaruhnya terhadap kualitas tata kelola dan kemandirian fiskal daerah.
  - 2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain diluar variabel penelitian ini yang lebih berpengaruh dan juga penambahan jumlah responden yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

b. Bagi pemerintah daerah

1) Pengelolaan Aset Daerah

- a) Dengan dilakukannya penghapusan dan pemindahtanganan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang ataupun niat untuk memperkaya diri sendiri atau merugikan daerah.
- b) Pemerintah daerah hendaknya membuat kebijakan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan daerah dibuat dengan mengacu pada Permendagri 17 Tahun 2007 dan didasarkan pada kekhasan unsur-unsur pengelolaan barang milik daerah.
- c) Pemanfaatan barang milik daerah pemerintah daerah hendaknya lebih dioptimalkan daya gunanya agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

- a) Pemerintah daerah hendaknya lebih teliti dalam seluruh penerimaan dan pengelolaan terutama bagian bendahara penerimaan dan pengeluaran bidang akuntansi. Tujuannya agar terbebas dari kesalahan pembebanan rekening bersangkutan, serta perlu ditingkatkannya SDM yang mengelola laporan keuangan melalui pelatihan-pelatihan sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.
- b) Pemerintah daerah diharapkan dalam pelaksanaan penghapusan bukuan aset tetap yang nilainya telah nol dan pelepasan atas aset yang masih mempunyai nilai manfaat agar dilaksanakan dengan tepat waktu dan cepat, agar tidak adanya penumpukan aset tetap yang tidak digunakan lagi.

3) Kualitas Laporan Keuangan Daerah

- a) Pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bukan untuk kebutuhan kelompok tertentu, sehingga para *stakeholders* dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi keuangan yang dibuat.



- b) Sebaiknya pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menyusun laporan keuangan daerah. Hal ini penting agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni tepat waktu, dapat diuji, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

---

### Daftar Pustaka

- Ferdianus. 2013. *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Untuk Menghasilkan Data Yang Dipercaya Dalam Laporan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Maluku)*. Tesis: Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat: Jakarta.
- Hidayati, Y., & Y. Darmayanti. 2016. Pengaruh siklus pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada pemerintah Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No. 1.
- Jauhari, H., S. Hazisma., & Dewata, E. 2021. The influence of regional financial accounting systems and standards government accounting on the quality of financial statements government. *Journal of Accounting Scientific Studies of Accounting*, Vol. 8, No. 1, pp. 01-13.
- Kusmariyanto, H., Titisari, K. H., & Astungkara, A. 2022. The Influence of regional asset management, human resource competence, and utilization of information technology on report quality finance (case study at the surakarta city tourism office. *Journal of Economics and Islamic Economics*, Vol. 5, No. 1, pp. 2614-3259.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. 2017. Pengaruh Sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 2, pp. 874-890.
- Nurlaila. 2014. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang)*. Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Prahaski, N. D. 2018. *Pengelolaan Aset Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan*

*Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

- Pudjo, H. S. 2022. The Influence of training, education and motivation of superiors on the usefulness of the regional financial accounting system in the Sidoarjo Regency Education and training staffing agency. *Enrichment: Journal of Management*, Vol. 12, No. 2, pp.1885-1891.
- Slamet, B., & Irmadiani, N. D. 2022. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi kasus pada BPKAD Kabupaten Bogor). *Journal Public Service and Governance*, Vol. 3, No. 1, pp. 67-79.
- Yunita, S. 2019. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Yuswanita, L., Basri, Y. M., & Nasrizal. 2018. The influence of information system, internal control system, and understanding regulation on the effectiveness of regional asset management, with the quality of regional aparatures as a moderating variables in pekanbaru city goverment. *International Journal of Economics, Business and Aplicatins*, Vol. 4, No. 2, pp. 18-30.